

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa lagu “Bayar, Bayar, Bayar” karya Sukatani merepresentasikan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di institusi Kepolisian di Indonesia. Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” hadir sebagai kritik sosial terhadap kegagalan pelayanan publik oleh Polri yang telah meresahkan masyarakat. Kegagalan pelayanan publik dalam tubuh institusi Kepolisian disebabkan adanya patologi birokrasi, berupa praktik gratifikasi dan pungutan liar kepada masyarakat. Melalui lirik-liriknya, lagu ini mengandung makna tersirat tentang praktik gratifikasi dan pungutan liar terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat Kepolisian kepada seluruh kalangan masyarakat. Praktik tersebut terjadi akibat mekanisme birokrasi yang tidak baik, di mana terdapat kerja sama antarlevel struktural—mulai dari lapisan bawah hingga atas—dalam melakukan praktik jual-beli pelayanan melalui penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi Kepolisian di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan adanya *informal governance* dalam setiap proses pelayanan publik yang selalu melibatkan praktik uang informal, sehingga aturan formal dan kebijakan resmi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seluruh proses pelayanan hanyalah berlangsung ‘di balik layar’ dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Praktik ketidaktrasparan dan minimnya akuntabilitas turut berkontribusi pada kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini yang semakin ekstrem.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran bagi penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian mengenai kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam sistem kekuasaan dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, perlu dipahami bahwa lagu tidak semata sebagai hiburan, tetapi sebagai medium ekspresi atas keresahan yang dirasakan masyarakat terhadap kemunduran demokrasi saat ini..

